

B u l e t i n



PARLEMENTARIA



KETUA
Dorong Transisi
Energi Hijau RI

Lindungi Keberlanjutan Pariwisata Raja Ampat

PARIPURNA
Lanjutkan
Pembahasan 8 RUU,
DPR Prioritaskan
Partisipasi Publik
dalam Legislasi

Nomor 1345/I/VI/2025 Juni 2025



9 772614 339005



Lindungi Keberlanjutan Pariwisata Raja Ampat



FOTO: WE/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, bersama tim saat melakukan kunjungan reses Komisi VII DPR RI di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/5/2025).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Evita menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat yang belakangan ramai disorot publik, termasuk oleh organisasi lingkungan Greenpeace.

“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja

Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” ujar Evita usai melakukan kunjungan reses Komisi VII DPR RI di Kota Sorong, Rabu (28/5).

Ia menyatakan kekagumannya terhadap kekayaan alam Raja Ampat yang bukan hanya terletak pada pantai dan lautnya, tetapi juga pada sungai, hutan, dan seluruh ekosistem yang menyatu sebagai potensi pariwisata berkelas dunia. Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata tidak boleh dikorbankan demi eksploitasi sumber daya alam

yang mengancam keseimbangan lingkungan.

Evita juga mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan tambang yang baru mulai beroperasi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mendesak evaluasi terhadap izin-izin tambang yang ada, serta meminta kejelasan mengenai komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan.

“Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi, apakah ini akan diteruskan? Suka tidak suka, harus kita katakan: bisa menjaga ekosistem? Bohong lah itu,” tegasnya. **we/aha**



Dorong Transisi Energi Hijau RI



FOTO: IST/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang, Nukaga Fukushima dalam kunjungan kerjanya di Tokyo, Rabu (28/5/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang, Nukaga Fukushima dalam kunjungan kerjanya di Tokyo. Dalam kesempatan tersebut, Puan meminta dukungan Jepang dalam bidang transisi energi hijau di Indonesia.

Pertemuan Puan dengan Ketua DPR Jepang, Nukaga Fukushima digelar sebelum acara peresmian Patung Presiden RI Pertama Sukarno di KBRI Tokyo, Rabu (28/5). Fukushima datang sebagai tamu undangan dalam acara peresmian. "Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang perlu terus diperkuat

terutama karena kita sama-sama menghadapi tantangan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global," ungkap Puan.

"Kedua negara merupakan pilar utama untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Asia," sambungnya.

Puan pun menyinggung upaya Pemerintah, termasuk KBRI di Jepang dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Ia mengatakan kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Jepang juga perlu terus diperkuat untuk melengkapi hubungan erat antara pemerintah. **aha**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmien Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerdali Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Scan QR
untuk berita
selengkapny

Lanjutkan Pembahasan Delapan RUU



FOTO: AFR/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

DPR RI akan memasuki masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, pada 28 Mei - 23

Juni 2025. Pada Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI akan terus melanjutkan pembahasan terhadap delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1.

Dalam pembentukan undang-undang, DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna atau *meaningful participation*. *Meaningful participation* tersebut merupakan

sarana komunikasi antara pembentuk undang-undang dan rakyat, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

“Komitmen ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat termasuk hak untuk didengar (*right to be heard*), untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*), dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dalam proses pembentukan undang-undang,” kata Puan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Adapun, beberapa RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I yakni: RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10

DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengedepankan partisipasi masyarakat

Tahun 2009 tentang Kepariwisata (carry over); RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (carry over); RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang (carry over). **bia/uc**

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Soroti APBN 2025

Ketua DPR RI Puan maharani mengatakan DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan mencermati pembahasan awal arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2026. Hal ini dilakukan di tengah gejolak perekonomian global yang menuntut kebijakan adaptif dan tangguh.

DPR RI mencatat bahwa realisasi anggaran triwulan pertama tahun 2025 masih menunjukkan konsolidasi fiskal internal pemerintah. Penekanan diberikan pada pentingnya efisiensi APBN 2025 yang harus disertai dengan kinerja baik dan transparansi pengelolaan.

“Setiap rupiah yang digunakan dalam APBN atau yang dihemat adalah uang rakyat yang dititip kelolakan untuk membangun kehidupan rakyat yang sejahtera,” tegas Puan, dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 dengan tema “kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.”

Tema ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan

reformasi struktural dan substansial guna membangun kemampuan dan kekuatan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, serta memperkuat ekonomi nasional.

“Tema tersebut juga sangat relevan dengan tatanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti dinamika global saat ini semakin menuntut kita untuk tidak dapat bergantung

sepenuhnya dengan mekanisme global pasar global kita harus membangun kekuatan dalam negeri,” lanjutnya.

Ke depan, DPR RI akan terus mencermati agar APBN Tahun Anggaran 2026 dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global, sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional.

— bia/aha

Ketua DPR RI Puan maharani saat menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).



FOTO: MUN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya





Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Partisipasi Publik Bahas RUU PPRT

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya partisipasi publik dan kehati-hatian dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Hal tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Saat ditanya awak media terkait perkembangan terbaru RUU PPRT yang kini naskah akademiknya kembali diubah dan diulang dari awal, Puan

menyampaikan bahwa DPR RI tetap mengedepankan proses yang inklusif dan cermat.

“Yang pasti, kita meminta dulu masukan dari elemen masyarakat,

Urgensi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sangat tinggi, proses pembentukan regulasi harus tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan keadilan

penerima pekerja, dan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan masukan-masukannya,” ujar Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Puan menegaskan bahwa proses legislasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, meski urgensi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sangat tinggi, proses pembentukan regulasi harus tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan keadilan.

“Jangan sampai terburu-buru, namun nanti kemudian melanggar aturan dan jangan ada pihak-pihak yang dirugikan,” tegas Puan.

RUU PPRT sendiri telah menjadi salah satu RUU yang mendapatkan sorotan luas dari publik dan kelompok masyarakat sipil karena menyangkut perlindungan hak-hak jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Perjalanan panjang pembahasan RUU ini mengalami berbagai dinamika, termasuk perubahan naskah akademik secara berulang. **pun/aha**



RAPBN Harus Terencana dan Transparan

Fraksi PDI-Perjuangan menilai bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 merupakan bagian strategis dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan I Wayan Sudirta dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang

2024–2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
“Oleh karena itu, pembahasan KEM PPKF menjadi sangat strategis dalam merancang struktur, bentuk, dan isi RAPBN Tahun Anggaran 2026,” ujar I Wayan.

Ia menyampaikan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah, dengan harapan agar pandangan dan masukan yang telah disampaikan dapat menyempurnakan dokumen KEM

PPKF 2026. Menurutnya, kerangka ini disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang produksi penting bagi hajat hidup rakyat banyak.

“Implementasi Pasal 33 itu harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang terencana, terukur, dan transparan,” tegasnya.

I Wayan mengungkapkan, Fraksi PDI-Perjuangan memberikan sejumlah catatan penting terhadap desain pertumbuhan ekonomi dalam KEM PPKF 2026. Di antaranya, target pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen harus diikuti dengan kebijakan sektoral oleh kementerian dan lembaga guna mendorong produktivitas di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan, transportasi, hingga perumahan. — **hal/aha**



Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan I Wayan Sudirta saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).



FOTO: JKA/PDT

Anggota Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Usul Insentif Pajak di APBN 2026

Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026 perlu memperhatikan dinamika global yang semakin tidak menentu, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (27/5).

“Situasi ekonomi dan geopolitik global dewasa ini tidak sedang baik-baik saja. Rivalitas antara negara-negara ekonomi utama dunia

seperti Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan efek *spillover* yang luar biasa ke seluruh dunia, tak terkecuali ke Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada perekonomian domestik karena kedua negara merupakan mitra dagang utama Indonesia. Maka dari itu, penguatan fondasi ekonomi nasional menjadi sangat krusial agar APBN 2026 mampu menghadapi tekanan eksternal dan mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

“Penguatan fondasi ekonomi semakin penting agar ketahanan

ekonomi nasional semakin kuat,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat itu.

Fraksi Partai Golkar pun menyatakan menyetujui pembahasan lebih lanjut atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026. Fraksi menilai tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi dalam Rangka Menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera” merupakan arah kebijakan yang tepat.

Namun, Nurul menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dibebankan hanya kepada kebijakan fiskal. “Seberapa pun besarnya stimulus fiskal melalui APBN tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan pertumbuhan kredit dan likuiditas yang mencukupi di sektor riil,” tegasnya.

hal/aha



SDM Unggul dan Pertumbuhan Inklusif

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangan fraksinya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/5), Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Fraksi P-Gerindra DPR RI, Annisa M.A. Mahesa, menyampaikan bahwa APBN 2026 harus disusun sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh

konstitusi. Ia menekankan bahwa tahun 2026 merupakan momen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Dinamika global yang penuh ketidakpastian menuntut SDM yang berdaya saing tinggi,” ujar Annisa.

Untuk itu, Fraksi P-Gerindra mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan

dan kesehatan, yang ditargetkan tercermin dalam peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57 pada tahun 2026. Fraksi juga mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44 persen serta penurunan angka kemiskinan nasional hingga 6,5 persen, dengan kemiskinan ekstrem dijaga di angka nol persen.

Fraksi P-Gerindra menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 2026 perlu dinaikkan ke kisaran 5,6 hingga 6,3 persen sebagai pijakan menuju capaian 8 persen di 2029. Target tersebut dinilai realistis, namun cukup menantang, terutama di tengah gejolak ekonomi global. Menurut Fraksi P-Gerindra, target tersebut dapat dicapai melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta dukungan politik yang kuat. — **hal/aha**

Anggota Fraksi P-Gerindra DPR RI, Annisa M.A. Mahesa saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).



Kebijakan Fiskal yang Sejahterakan Rakyat



FOTO: GER/PDT

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyatakan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi. Hal ini disampaikannya saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/5).

“Meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik global, Fraksi PKB menilai kebijakan fiskal ini perlu didukung demi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” ujarnya

Target pertumbuhan ekonomi Pemerintah tahun 2026 yang berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen dinilai rentang ini cukup konservatif dan cenderung *under-estimate* atau kurang optimis

dalam keterangan rilis yang diterima **Parlementaria**, Selasa (27/5).

Menurutnya, diperlukan penguatan menyeluruh yang didukung oleh optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Fraksi PKB

menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri.

Lanjutnya, target pertumbuhan ekonomi Pemerintah tahun 2026 yang berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen dinilai rentang ini cukup konservatif dan cenderung *under-estimate* atau kurang optimis. Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu antara 5,6 hingga 6,0 persen.

“Target ini dapat tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pendorong utama seperti konsumsi rumah tangga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis,” urai Gus Rivqy. **gal/aha**



Reformasi Struktural & Strategi yang Berpihak

Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan kritis terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI. Fraksi Nasdem menilai bahwa

bahwa pencapaian target tersebut bergantung pada kebijakan yang konsisten, tepat sasaran, dan berbasis pada kondisi riil masyarakat.

Struktur perekonomian nasional dinilai masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat

dan domestik. Strategi yang memperkuat daya tahan rumah tangga serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sangat mendesak,” tegas Fraksi Partai NasDem.

Terkait kebijakan fiskal, Fraksi Partai NasDem mendukung langkah Pemerintah dalam meningkatkan



FOTO: JKA/PDT

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah perlu diperkuat melalui strategi yang terpadu, adil, serta responsif terhadap tantangan struktural dan tekanan global.

Fraksi Partai NasDem menyambut baik proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen, namun menggarisbawahi

dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Data menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB hanya tumbuh 4,98 persen pada 2024, masih di bawah pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,02 persen.

“Kebijakan ekonomi makro harus adaptif dan responsif terhadap tekanan global

pendapatan negara hingga 12,22 persen dari PDB. Namun, Fraksi Nasdem menekankan pentingnya memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memaksimalkan potensi sektor digital dan informal melalui digitalisasi sistem perpajakan dan integrasi data antar-kementerian.

hal/aha



Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi Berkelanjutan



Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pemerintah. Pandangan Fraksi PAN dibacakan oleh Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Fraksi PAN menilai tema besar tahun 2026, yakni Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, sebagai arah kebijakan yang relevan di tengah ketidakpastian global. “Kedaulatan bukan sekadar

ketahanan, tetapi menyangkut kemandirian bangsa dan pembangunan berkeadilan,” ujar Wahyudin.

Fraksi PAN mengapresiasi capaian signifikan pemerintah dalam peningkatan produksi beras dan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi yang membawa Indonesia menjadi negara dengan produksi beras tertinggi di ASEAN. Dukungan juga diberikan terhadap penguatan desa, koperasi, dan infrastruktur pertanian sebagai fondasi ketahanan nasional.

Fraksi PAN menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% tahun 2026 cukup optimis,

namun tetap memerlukan kebijakan realistis dan strategi mitigasi risiko. Pemerintah didorong untuk memperkuat belanja negara secara efektif, memperluas insentif fiskal, dan mempercepat pelaksanaan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis serta penguatan UMKM dan investasi.

PAN juga menekankan pentingnya reformasi iklim investasi, penyederhanaan regulasi, dan kepastian hukum untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha dan ekspor. Strategi fiskal hijau dinilai perlu diperjelas, termasuk dengan percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. **gal/aha**



Wujudkan Kedaulatan Pangan & Energi



FOTO: JKA/PDT

Anggota DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (27/5).

Fraksi PKS menyambut baik transisi kepemimpinan nasional yang berjalan lancar dan menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fraksi PKS menilai bahwa kebijakan fiskal 2026 yang diarahkan untuk mewujudkan 'Kedaulatan

Pangan, Energi, dan Ekonomi' merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

"Kami menilai kebijakan fiskal tahun 2026 harus digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam gejolak ekonomi global, sekaligus mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat," ujar Yanuar.

PKS juga mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,6 persen sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045. Fraksi menilai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi modal penting untuk mencapai target tersebut.

Lebih lanjut, Fraksi PKS menekankan pentingnya belanja negara yang berkualitas, utamanya dalam sektor pelayanan publik, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam bidang pembangunan, Fraksi PKS mendukung penuh program prioritas pemerintah seperti pembangunan dari desa, program makan bergizi gratis, dan penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Fraksi juga mendukung peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan negara. **gal/aha**



Kebijakan Fiskal yang Inklusif dan Berkelanjutan



Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dina Lorenza saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dan memberikan apresiasi atas semangat konstruktif pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal

pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“KEM-PPKF 2026 hadir dalam momentum strategis sebagai fondasi arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dina Lorenza dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Namun, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti berbagai tantangan global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, seperti eskalasi konflik internasional, proteksionisme, dan fragmentasi rantai pasok. Di sisi domestik, tantangan struktural seperti ketimpangan wilayah, rendahnya produktivitas, dan tingginya sektor informal menjadi sorotan penting.

Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya ketepatan alokasi anggaran, utamanya untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk Makan Bergizi Gratis. Selain itu, kesejahteraan aparat negara, petani, nelayan, dan buruh dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional.

Pentingnya ketepatan alokasi anggaran, utamanya untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Fraksi juga mengkritisi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. “Tanpa kapasitas yang riil dan operasional di tingkat daerah, otonomi fiskal hanya akan bersifat simbolik,” tegas Dina. Reformasi mekanisme transfer ke daerah dan peningkatan kapasitas fiskal lokal disebut sebagai hal mendesak.

gal/aha



Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara



FOTO: RSB/PDT

Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam acara penyerahan LHP LKPP dan IHPS II Tahun 2024 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa (27/5).

Opini WTP diberikan berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Bendahara

Umum Negara (LKBUN) dan 84 laporan kementerian/lembaga. Meski dua instansi, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), BPK menyatakan hal itu tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP secara keseluruhan.

Namun, BPK mencatat sejumlah permasalahan penting, termasuk: adanya ketidaksesuaian data PPN dan PPH dengan sistem perpajakan, pengendalian belanja pegawai dan dana transfer daerah yang belum memadai, dan kebijakan belanja dibayar di muka yang masih lemah dalam akuntabilitas penyelesaiannya.

Pada semester II tahun 2024,

BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun. Selain itu, penghematan pengeluaran negara juga dicapai melalui koreksi subsidi dan kompensasi sebesar Rp1,09 triliun.

Di sisi lain, BPK turut mendukung pemberantasan korupsi melalui: Pemeriksaan investigatif dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun. Tidak hanya itu saja, ada sejumlah rekomendasi strategis, termasuk evaluasi program haji, pendidikan, dan energi baru terbarukan. 🐦

um/aha





FOTO: AZK/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat doorstop menanggapi pertanyaan awak media usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Minta Penulisan Ulang Sejarah Dilakukan Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kehati-hatian dan keterbukaan dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. Puan menegaskan bahwa penulisan sejarah merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan harus menjunjung prinsip transparansi.

“Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan

transparan,” ujar Puan saat *doorstop* menanggapi pertanyaan awak media seputar langkah Kementerian Kebudayaan yang tengah menyusun ulang narasi sejarah Indonesia, usai memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa (27/5).

Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa sejarah, meski mengandung bagian-bagian yang pahit tetap harus diungkap secara jujur kepada generasi penerus. “Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah,” tegas Puan mengutip pesan Bung Karno.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut

menyatakan bahwa DPR RI pada prinsipnya tidak menolak adanya upaya perbaikan narasi sejarah selama itu dilakukan dengan niat baik dan metodologi yang kuat.

“Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Tapi namanya sejarah, apakah itu pahit atau baik? Kalau memang itu harus dilakukan, ditulis ulang ya ditulis ulang dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Tak hanya itu, menanggapi rencana pemerintah melalui Menteri Kebudayaan mengganti istilah “Orde Lama” dalam penulisan ulang sejarah nasional, Puan meminta agar perubahan tersebut tidak melukai pihak mana pun atau menghilangkan fakta sejarah. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapannya



Kodam Tanjungpura Dapat Dukungan Penuh



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, bersama tim saat kunjungan kerja ke Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5/2025).

Dalam kunjungan kerja ke Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5), Komisi I DPR RI menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi TNI di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya terkait keterbatasan alutsista, jumlah personel, dan kesejahteraan prajurit.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengapresiasi semangat dan kesiapan Pangdam XII/Tanjungpura beserta jajaran dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Ia menegaskan bahwa aspirasi dan laporan yang diterima akan menjadi bahan perjuangan Komisi I di tingkat pusat.

“Kita telah menerima aspirasi dan laporan tentang kesiapan dan kemampuan. Dengan keterbatasan

yang ada, kita apresiasi luar biasa Panglima dan jajarannya,” ujar Dave. Dave juga menekankan

pentingnya peningkatan kemampuan operasional TNI di daerah perbatasan, termasuk penambahan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit, sebagai bagian dari pelaksanaan program Asta Cita Presiden RI.

“Semuanya itu akan kita perjuangkan ke depannya, agar TNI semakin siap menghadapi tantangan dan menjalankan fungsi strategis di wilayah perbatasan,” tambahnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kodam XII/Tanjungpura, Pangdam menjelaskan bahwa luasnya wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang mencapai 966 km menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan. Terlebih lagi, kondisi infrastruktur yang kurang memadai turut memperberat tugas personel di lapangan. **est/gal**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kemandirian Fiskal Provinsi NTB



FOTO: GYS/PDT

Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, saat kunjungan di Kota Mataram, NTB, Rabu (28/5/2025).

Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus kondisi Bank NTB Syariah terkini dalam kunjungan ke Bank

NTB Syariah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan yang dilakukan secara spontan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi BUMD serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi NTB.

Dalam pernyataannya, Fauzan menekankan pentingnya peran BUMD sebagai pilar dalam menciptakan kemandirian fiskal daerah. “Komisi II DPR RI sangat konsen terhadap BUMD dan BLUD karena kita ingin daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki pendapatan sendiri. Kemandirian fiskal sangat penting agar ketergantungan terhadap APBN bisa dikurangi,” tegas Fauzan kepada Parlementaria usai kunjungan di Kota Mataram, NTB, Rabu (28/5).

Ia menyoroti bahwa saat ini hanya sedikit daerah yang mampu berdiri secara fiskal tanpa sokongan pusat. Ia menyebut bahwa BUMD, melalui unit-unit bisnis yang sah secara hukum, seharusnya menjadi instrumen utama daerah untuk menghasilkan pendapatan melalui dividen, yang nantinya bisa memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tak hanya itu saja, Fauzan juga menyoroti lemahnya permodalan Bank NTB Syariah. Ia menyebutkan bahwa bank tersebut hingga kini belum memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia. Akibatnya, Bank NTB Syariah masih berada di bawah binaan Bank Jatim. **gys/um**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Rawan Narkoba, Anggaran BNN Maluku Diperjuangkan



geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste, dan Filipina menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap jalur-jalur penyelundupan harus diperkuat.

"BNN Provinsi dan Daerah baru ada dua yang kami lihat, sedangkan luas wilayah Maluku begitu luas. Yang kedua, jangan lupa bahwa Maluku ini berbatasan langsung dengan Australia, Timor-Timur, dan Filipina. Jalur-jalur itu kan sangat rawan, bukan hanya narkoba, tapi juga penyelundupan senjata ilegal dan sebagainya," jelasnya.

— qq/rdn

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyoroti minimnya alokasi anggaran dan fasilitas yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku. Soedeson menegaskan pentingnya peningkatan anggaran dan dukungan sumber daya bagi BNN, khususnya di wilayah perbatasan seperti Maluku yang dinilainya sangat rawan terhadap peredaran narkoba dan penyelundupan ilegal.

"Tentu saya kebetulan di Komisi III DPR dan Badan Anggaran DPR, kami terus terang akan mendorong di bidang anggaran, khususnya di BNN secara nasional itu sekitar Rp 2,4 triliun. Maluku hanya sekitar Rp 7 atau 9 miliar, itu menurut saya sangat kurang," ujar Soedeson kepada *Parlementaria* usai melakukan Kunjungan Kerja

Reses Komisi III DPR RI ke Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (28/5).

Ia mengungkapkan bahwa saat ini, di Provinsi Maluku hanya terdapat dua kantor BNN, padahal wilayah tersebut memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks. Selain itu, letak

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (28/05/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: AAS/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan foto bersama disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).

Utamakan Ternak Lokal untuk Kurban

Menyambut datangnya Hari Raya Iduladha, Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, untuk meninjau langsung ketersediaan dan kesiapan hewan kurban. Kunjungan ini melibatkan sejumlah mitra kerja strategis, seperti ID Food, PT Berdikari, dan Badan Pangan Nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi

lonjakan permintaan hewan kurban. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa hewan-hewan yang akan dikurbankan memenuhi standar kesehatan dan gizi.

“Kita berharap bahwa kita bisa menyediakan hewan kurban yang layak, yang sehat, yang bergizi, untuk kebutuhan hari raya dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya,” kata Ahmad Yohan kepada **Parlementaria** usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/5).

Legislator Dapil NTT ini mengungkapkan, masih banyak

ditemukannya berbagai persoalan krusial, salah satunya terkait mobilisasi hewan antar-wilayah. Ia mengingatkan bahwa menjelang Iduladha, pergerakan hewan ternak meningkat tajam, sehingga pengawasan harus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Dan tadi diskusinya panjang sekali, karena kita melihat masih banyak persoalan. Itu antara lain, karena ini mau Hari Raya Iduladha, sehingga mobilisasi hewan kurban dari kabupaten, dengan satu kabupaten lainnya, (dari) provinsi ke satu provinsi lainnya, yang kita khawatirkan ini, kalau tidak hati-hati dikarantina, memastikan ini sapi yang beredar ini adalah sudah divaksinasi, dijamin kesehatannya, bisa memunculkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan lain sebagainya,” tegas Politisi Fraksi PAN ini. **aas/rdn**



Tinjau Jalan Rusak di Tulungagung



Ketua Tim Kunsfik Komisi V DPR Ridwan Bae, bersama tim, saat meninjau infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Jumat (23/5/2025).

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Jumat (23/5).

“Kunjungan kerja ini untuk merespon keluhan Bupati

Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait kerusakan infrastruktur yang masif. Mencermati apa yang terjadi di sini, akan kami perjuangkan di tingkat komisi melalui kementerian terkait,” ungkap Ridwan Bae selaku Ketua Tim Kunsfik Komisi V DPR usai menggelar pertemuan dengan Bupati dan para OPD di Pendopo

Kabupaten Tulungagung.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Komisi V DPR RI telah meninjau langsung kondisi dan progres infrastruktur jalan nasional yaitu Jl. Jayeng Kusumo, Jl. Pahlawan, serta Perempatan Jepun. Sedangkan jalan Kabupaten yaitu Ruas Pulosari, Jl. Bukur, dan Jl. Kepatihan sebagai bentuk konkret dari penguatan peran strategis legislatif dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN.

“Pembiayaan perbaikan infrastruktur yang rusak ini tidak terpengaruh kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan presiden. Sebab presiden pada prinsipnya melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat. Dana hasil efisiensi akan dikembalikan ke rakyat dengan skala prioritas,” tukas Legislator asal Dapil Sulawesi Tenggara ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini juga mengharapkan agar pembangunan di bidang infrastruktur di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dapat mempercepat Bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya. Sehingga, hal itu akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

—oji/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: OJI/RDN

Terapkan KRIS di Seluruh RS



Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, saat memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (02/06/2025).

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti tantangan penerapan standarisasi kelas rawat inap (KRIS) di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengenai kondisi rumah sakit di Indonesia.

“Apa yang disampaikan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), banyak rumah sakit Pemerintah maupun swasta. Kalau swasta masih kita makhlum, tetapi rumah sakit Pemerintah, sekali lagi ini ada keterbatasan anggaran,” kata Felly Estelita Runtuwene kepada **Parlementaria** usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6).

Lebih lanjut, kata Felly, meski rumah sakit swasta memiliki dinamika tersendiri yang bisa dimaklumi. Ini menjadi perhatian utama harus diberikan pada rumah sakit pemerintah yang sering menghadapi keterbatasan anggaran. “Walaupun dari waktu ke waktu, tetapi memang harus diterapkan. Karena ini, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat harus diterapkan, tetapi juga bagaimana kontrol,” ujarnya.

Legislator Dapil Sulawesi Utara ini menekankan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan sistem kontrol yang jelas dan tegas. “Siapa yang harus mengontrol boneka ini, ini juga. Karena, kalau kita memberikan waktu terus-terusan, ini tidak akan pernah terjadi. Jadi, memang harus

Meski rumah sakit swasta memiliki dinamika tersendiri yang bisa dimaklumi. Ini menjadi perhatian utama harus diberikan pada rumah sakit pemerintah yang sering menghadapi keterbatasan anggaran.

ada waktu sambil juga melihat dari kondisi atau kemampuan keuangan daerah,” bebernya.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian penerapan standar juga harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, khususnya bagi rumah sakit daerah. Sedangkan rumah sakit swasta, kata Felly, sangat bergantung pada sistem BPJS, yang menjadi salah satu faktor penentu kesiapan mereka dalam penerapan standar. **aas/aha**





Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, bersama tim meninjau langsung kondisi RSUD Manokwari, Papua Barat, Rabu (28/5/2025). Dalam kunjungan kerja reses ini, tim menyoroti minimnya fasilitas dasar, alat medis, serta kekurangan tenaga kesehatan. Foto: run/aha



DI BALIK KURSI

TNP
PARLEMEN

 YouTube @tvrparlemen

 @tvr.parlemen



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri